

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN  
UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2014-2018**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat - syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**Pera Anggraini**

**1451010228**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN  
UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2014-2018**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat  
Guna Memperoleh Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Pera Anggraini

1451010228

Program Studi: Ekonomi Syariah

Pembimbing 1 : Syamsul Hilal, S. Ag., M.Ag

Pembimbing 2 : M. Kurniawan, SE., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020M**

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks terjadi di masyarakat sekitar. Kemiskinan menjadi permasalahan utama yang harus segera dituntaskan oleh semua pihak termasuk khususnya pemerintah yang berwenang. Berdasarkan data statistik selama kurun waktu lima tahun sejak 2014 – 2018 tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung bersifat dinamis.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung secara parsial dan simultan? Serta bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang kemiskinan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan secara parsial dan simultan di Provinsi Lampung serta untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap kemiskinan.

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian dokumentasi atau studi pustaka (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel.

Berdasarkan hasil analisis penelitian diperoleh hasil bahwa: variabel pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien 0.021981, nilai t-statistik sebesar 0.052685 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0428 ( $< 5\%$ ), pengaruh upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung dengan nilai koefisien variabel sebesar 0.062153 dengan nilai t statistik sebesar 0.204403 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.0398 ( $< 5\%$ ). Secara simultan tingkat pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan. Menurut perspektif Islam, Kemiskinan dibagi dua yaitu kemiskinan finansial dan kemiskinan hati. Masyarakat cenderung mengartikan kemiskinan secara finansial saja tanpa memikirkan bahwa sifat iri, dengki, sombong merupakan tanda-tanda kemiskinan secara rohani. Gerakan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta lembaga terkait juga terfokus pada pengentasan kemiskinan finansial, karena kemiskinan secara finansial cenderung menjadi faktor pendorong adanya kemiskinan hati

Kata Kunci : *Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Tingkat Kemiskinan.*





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Lelakoh Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (072) 1780887-701531

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Terhadap  
Kemiskinan Di Provinsi Lampung Ditinjau Dari Perspektif  
Ekonomi Islam Periode 2014-2018**

**Nama Mahasiswa : Pera Angraini**

**NPM : 1451010228**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunakosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Hi. Syamsul Hilal, M.Ag**  
**NIP.1969092201121001**

**Pembimbing II**

**M. Kurniawan, SE., M.E.Sy**  
**NIP.198605122013031005**

**Mengetahui**

**Madrasah, SE.M.S.I**

**NIP.197504242002121001**





KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Let.kol II. Endang Suarjono Sukarano I Bandar Lampung 35131 0721 703260

**PENGESAHAN**

Skrripsi dengan judul **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2014-2018**, disusun oleh Nama : **Pera Anggraini NPM. 1451010228**, Jurusan **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal :

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : **Dr. Ahmad Isnaeni, M.A**

Sekretaris : **Dania Hellin Amrina, S.E. M.Sc**

Penguji I : **Dedi Firmansyah, S.E., M.Si**

Penguji II : **Hi. Syamsul Hifal, M.Ag**

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**Dr. Ruslan Abdul Ghofar, M.Si NIP. 198008012003121001**



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝٨

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.*

(QS. Al-Insyrah94 :6-8)

Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.

## PERSEMBAHAN



Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Ayah Basiran dan Ibunda Ponirah. Terimakasih yang tiada henti-hentinya atas doa, kasih dan sayang, pengorbanan, serta perjuangan yang sudah ibu dan ayah berikan. Semoga setiap tetes keringat yang mengalir demi memperjuangkan putra – putri ibu dan ayah mendapat ridho dari Allah SWT Semoga hasil karya ini menjadi awal untuk membahagiakan ibu dan ayah.
2. Adikku tercinta Veri Dwi Melani, Andhira Akiela Putri dan Elfrido Andrea Putra yang memberiku semangat untuk menjadi diri yang lebih baik yang dapat dicontoh oleh dirimu. Semoga hasil karya ini bias menjadi semangat agar bias menjadi diri yang lebih baik dan membahagiakan ibu dan ayah kelak.

## **RIWAYAT HIDUP**

Pera Anggraini lahir di Gisting pada tanggal 22 Januari 1997. Penulis bertempat tinggal di Gisting Permai, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Penulis merupakan putrid pertama dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Basiran dan Ibu Ponirah.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu bermulai dari SDN 3 Gisting Atas lulus tahun 2008, SMPN 1 Gisting lulus tahun 2011, SMA Muhammadiyah 1 Gisting lulus pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014, penulis mengikuti program S1 Ekonomi Syariah sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswi program S1 Ekonomi Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul Skripsi: **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2014-2018”** Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita diberikan syafaatnya di yaumul akhirkelak.

Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya banyak sekali proses yang harus dilalui oleh penulis, dengan berbagai kesulitan dan kemudahan yang dijalani. Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih setulus-tulusnyakepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
2. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I, Selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden IntanLampungyang senantiasa memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Madnasir, S.E., M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariahyang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa-mahasiswinya.
4. Hi.Syamsul Hilal,M.Ag, Selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. M Kurniawan, SE., M.E.Sy.Selaku Pembimbing II yang selalumemberi

arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak mendidik, memberikan ilmu, dan memberikan banyak pengalaman selama menuntut ilmu di Fakultas ini.
7. Kepala Perpustakaan, petugas akademik, dan segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam baik secara langsung maupun tidak langsung, telah terlibat dan banyak membantu pembuatan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta terima kasih atas bantuan, semangat dan nasehat dari kalian semua.
9. Teman-teman seperjuangan ekonomi syariah angkatan 2014 khususnya kelas F. Terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini kalian selama ini, semoga kelak kita bisa sering berkumpul lagi dilain waktu.
10. Terima kasih untuk teman-teman KKN yang telah memberikan semangat kepadaku
11. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.
12. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dengan iringan kata terima kasih, penulis mengucapkan do'a kehadirat Allah SWT, semoga jeri payah dan amal bapak dan ibu serta teman-teman akan mendapatkan manfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar lampung, Februari 2020  
Penulis,

**Pera Anggraini**  
NPM. 1451010228



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Batasan Masalah .....	13
E. Rumusan Masalah .....	14
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sumber Data .....	16
3. Metode Pengumpulan Data .....	16
4. Metode Analisis Data .....	16
5. Variabel Penelitian .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pendidikan .....	18
1. Pengertian Pendidikan .....	18
2. Manfaat Pendidikan .....	20
3. Tujuan Pendidikan .....	21

4. Tujuan Pendidikan Dalam Islam.....	25
5. Pendidikan dan Pasar Kerja.....	27
6. Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi.....	29
7. Pendidikan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	31
B. Upah Minimum .....	34
1. Pengertian Upah .....	34
2. Teori – teori Upah .....	39
3. Upah Minimum Terhadap Standar Hidup Layak .....	40
4. Penggolongan Upah .....	42
5. Jenis – jenis Upah .....	44
6. Upah Minimum Menurut Perspektif Ekonomi Islam .....	46
C. Kemiskinan .....	49
1. Pengertian Kemiskinan .....	49
2. Teori – teori Kemiskinan .....	52
3. Jenis-jenis Kemiskinan.....	54
4. Indikator Kemiskinan.....	57
5. Faktor – faktor Penyebab Kemiskinan.....	59
6. Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	64
D. Penelitian Terdahulu .....	67
E. Kerangka Berfikir.....	69
F. Hipotesis .....	71

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	74
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	74
2. Sumber Data .....	75
3. Teknik Pengumpulan Data.....	76
4. Populasi dan Sampel.....	76
5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	78



B. Metode Analisis Data.....	79
1. Uji Validitas dan Reabilitas.....	79
C. Analisis Data.....	83
1. Uji Asumsi Klasik.....	83
2. Analisis Data Panel.....	85

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Hasil Penelitian.....	87
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	87
2. Tingkat Pendidikan.....	90
3. Upah Minimum.....	91
4. Kemiskinan.....	92
B. Analisis Data.....	94
1. Pengujian Asumsi Klasik.....	94
2. Hasil Uji Hipotesis.....	99
3. Uji Koefisien Determinasi.....	103
4. Persamaan regresi Linier Berganda.....	103
C. Pembahasan.....	104
1. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan.....	104
2. Pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan.....	107
3. Pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap Tingkat kemiskinan.....	109
4. Pandangan Ekonomi Islam tentang Kemiskinan.....	113
5. Pandangan Ekonomi Islam tentang Pendidikan.....	114
6. Pandangan Ekonomi Islam tentang Upah Minimum.....	115

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Persentase penduduk miskin menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2011 – 2018 ..... 4
Tabel 2	Persentase tingkat kemiskinan Provinsi Lampung menurut Kota/Kabupaten tahun 2014 - 2018 ..... 5
Tabel 3	Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan dan jenis Kelamin Provinsi Lampung tahun 2014 - 2018 ..... 9
Tabel 4	Jumlah penduduk miskin (dalam ribuan jiwa) menurut Kabupaten / Kota tahun 2014 - 2018 ..... 12
Tabel 5	Indikator Kemiskinan dilihat dari Konsumsi Beras Pertahun 57
Tabel 6	Kecamatan yang ada di setiap Kota/Kabupaten di lampung 89
Tabel 7	Angka melek huruf Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung 90
Tabel 8	Upah minimum Kota /Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2018 ..... 91
Tabel 9	Persentase penduduk miskin menurut Kota/Kabupaten Di Provinsi Lampung tahun 2014 - 2018 ..... 93
Tabel 10	Hasil regresi utama pengaruh tingkat pendidikan dan upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung 94
Tabel 11	Hasil Uji Multikolineritas ..... 96
Tabel 12	Hasil Uji <i>Breusch-Godfrey (BG)</i> ..... 97
Tabel 13	Hasil Uji Heterokedastisitas ..... 98
Tabel 14	Nilai t-statistik dan koefisien tingkat pendidikan dan upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2018 ..... 101



## DAFTAR GAMBAR

		<b>Halaman</b>
Gambar 1	Teori Lingkaran Kemiskinan .....	52
Gambar 2	Kerangka Berfikir .....	70
Gambar 3	Hasil uji <i>Jarque-Bera</i> pengaruh tingkat pendidikan dan UMK Terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2014 - 2018 .....	95
Gambar 4	Uji Heterokedastisitas .....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera tahun 2014 – 2018 (dalam satuan persen)
- Lampiran 2 : Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Menurut Kota / Kabupaten Tahun 2014 – 2018
- Lampiran 3 : Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018.
- Lampiran 4 : Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan jiwa) Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2014 - 2018
- Lampiran 5 : Angka Melek Huruf Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2014 - 2018
- Lampiran 6 : Upah Minimum Kota / Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2014 - 2018
- Lampiran 7 : Hasil Regresi Utama Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2014-2018
- Lampiran 8 : Uji Multikolineritas
- Lampiran 9 : Hasil Uji *Breusch-Godfrey*
- Lampiran 10 : Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 11 : Nilai t-statistik dan koefisien tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2014 -2018

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Periode 2014 - 2018”**. Sebelum peneliti menjelaskan materi lebih dalam, saya akan menjelaskan beberapa istilah dalam skripsi ini. Perlu memberikan batasan pada makna kalimat dalam skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu saya jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu ( orang atau benda ) yang ikut membentuk watak , kepercayaan , atau perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2008, h. 1045

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

3. Upah minimum adalah upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar.
4. Kemiskinan adalah salah satu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok.<sup>3</sup>
5. Perspektif Ekonomi Islam adalah berasaskan pada Al-Qur'an dan sunah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan didalamnya dalam bentuk suruhan dan larangan. Suruhan dan larangan tersebut bertujuan untuk membangun keseimbangan rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid.<sup>4</sup>

Bedasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Serta tinjauannya dari perspektif Ekonomi Islam.

## **B. Alasan memilih judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini bertujuan alasan secara objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut:

---

299 <sup>3</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta Universitas Gajah Mada 2015, h.

<sup>4</sup>Viethzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 88



## **1. Secara Objektif**

- a. Tingkat Pendidikan dan UMK di Provinsi Lampung dari tahun 2014 – 2018 mengalami peningkatan akan tetapi jumlah Kemiskinan Provinsi Lampung masih tinggi.
- b. Kemiskinan di Provinsi Lampung secara menyeluruh selalu mengalami dinamika dari tahun ke tahun dengan angka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan daerah diluar provinsi Lampung.

## **2. Secara subjektif**

- a. Penelitian ini merupakan penelitian terbaru pada topik yang sama di kalangan para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik data sekunder dan data primer memiliki kemudahan akses serta akses letak objek penelitian mudah dijangkau oleh penulis.

## **C. Latar Belakang**

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan di negara berkembang menjadi masalah yang pelik penyelesaiannya meskipun

kebanyakan negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi, namun pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan meningkat terutama di wilayah pedesaan.

Dewasa ini kemiskinan pedesaan menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan karakteristik penyebab kemiskinan struktural yang dialami sangat banyak. Selain itu kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan dari pada daerah pedesaan, merupakan salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah pedesaan.

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional<sup>5</sup>. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar

---

<sup>5</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 344.

hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

**Tabel 1**  
**Presentase Penduduk Miskin Provinsi**  
**di Sumatera Tahun 2011 – 2015 (dalam satuan persen)**

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11.36	10.92	10.79	10.42	9.63	10.62
Sumatera Utara	9.81	10.51	9.69	8.96	8.84	9.56
Sumate Barat	5.41	5.73	5.52	5.11	4.99	5.35
Riau	6.53	7.05	6.38	6.55	6.25	6.55
Jambi	10.67	12.11	10.73	10.53	10.08	10.82
Sumatera Selatan	12.96	12.51	12.73	12.36	12.43	12.60
Bengkulu	17.19	18.15	16.16	15.41	14.94	16.37
Lampung	10.68	9.25	10.15	9.13	9.06	9.65
Bangka Belitung	3.04	2.77	2.67	3	2.78	2.85
Kepulauan Riau	5.61	5	4.99	5.39	5.15	5.23

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019*

Berdasarkan data tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa dalam skala Pulau Sumatera, persentase kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 16.37 persen, sedangkan persentase terkecil adalah Provinsi Bangka Belitung yakni hanya sebesar 2.85 persen, sementara itu untuk Provinsi Lampung sendiri

Kemiskinan di Provinsi Lampung masih menjadi perhatian khusus mengingat angka persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung yang

masih tinggi meskipun tiap tahun mengalami penurunan akan tetapi penurunannya tersebut belum terlalu signifikan. Berikut disajikan data angka persentase Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2014 – 2018:

**Tabel 2**  
**Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung**  
**Menurut Kota/Kabupaten Tahun 2014 – 2018**

Wilayah	Persentase Kemiskinan				
	2014	2015	2016	2017	2018
Lampung Barat	13.70	14.18	15.06	14.32	13.54
Tanggamus	14.95	14.26	14.05	13.25	12.48
Lampung Selatan	16.77	16.27	16.16	15.16	14.86
Lampung Timur	17.05	16.91	16.98	16.35	15.76
Lampung Tengah	13.13	13.3	13.28	12.9	12.62
Lampung Utara	23.32	23.2	22.92	21.55	20.85
Way Kanan	15.03	14.61	14.58	14.06	13.52
Tulang Bawang	8.66	10.25	10.2	10.09	9.7
Pesawaran	17.51	17.61	17.31	16.48	15.97
Pringsewu	9.83	11.8	11.73	11.3	10.5
Mesuji	6.57	8.2	8	7.66	7.55
Tulang Bawang Barat	7.12	8.23	8.4	8.11	8.1
Pesisir Barat	-	15.81	15.91	15.61	14.98
Bandar Lampung	10.6	10.33	10.15	9.94	9.04
Metro	10.82	10.29	10.15	9.89	9.14
Provinsi Lampung	14.21	14.35	14.29	13.69	13.14

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung*

Berdasarkan data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya selama kurun waktu lima tahun tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan meskipun ditahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan itupun juga dikarenakan Provinsi Pesisir Barat baru terdata mulai tahun 2015.

Selanjutnya tingginya pasokan tenaga kerja di satu sisi dan lambanya penyerapan tenaga kerja di lain sisi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi hampir semua perekonomian negara sedang berkembang. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks



karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja dimasa yang akan datang tidaklah gampang karena disamping mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi dimasa mendatang.

Kondisi kerja yang baik, kualitas *output* yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha.<sup>6</sup>

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat indikator pendidikan. Pengalaman menunjukkan bahwa kebodohan dan kemiskinan bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait. Kebodohan dapat menjadi sumber kemiskinan dan kemiskinan dapat menjadi sumber kebodohan.

Pendidikan sendiri pada dasarnya adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan juga merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pendidikan secara formal maupun non formal.

---

<sup>6</sup> Maimun sholeh, *permintraan dan penawaran tenaga kerja serta upah: teori serta beberapa potretnya di indonesia*. Universitas negeri yogyakarta, jurnal ekonomi & pendidiks n , vol 4 no 1, april 2007. H 62

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 yang menjelaskan bahwa ”setiap warga negara berhak atas pendidikan” dan dijabarkan dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.24/PUU-V/2007 menetapkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk belanja pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan nasional yang dimaksud adalah pendidikan berdasarkan UUD dan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional (biasa dikenal dengan sisdiknas atau SPN) dimaksud sebagai arah dan strategi pembangunan nasional di bidang pendidikan.<sup>7</sup>

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok, yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep “*Link dan Match*”, yaitu pendekatan atau strategi

---

<sup>7</sup>Adi Widodo, Waridin, Johanna Maria K, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, vol 1 nomor 1, juli 2011. H 27

meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang dimaksud dengan efisiensi pengelolaan pendidikan adalah pendidikan yang diselenggarakan diharapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Upaya perbaikan pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1994. Mulai tahun tersebut, pemerintah mulai melaksanakan program wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan program wajib belajar 9 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini, diharapkan tingkat pendidikan masyarakat semakin membaik.<sup>8</sup>

Bersamaan dengan itu, pembangunan sarana fisik dan prasarana pendidikan juga terus dipacu sehingga penduduk usia sekolah dapat semakin mudah mengakses fasilitas pendidikan yang ada. Untuk mempercepat program wajib belajar 9 tahun, pemerintah juga memberikan subsidi berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada tingkat SD dan SLTP. Selain itu, ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah harus mengalokasikan 20 persen anggaran pemerintah di bidang pendidikan seharusnya memacu percepatan perbaikan pendidikan rakyat Indonesia. Peningkatan kualitas masyarakat tentunya tidak hanya terbatas pada kelompok usia sekolah saja tetapi diharapkan dapat mencakup kelompok usia menengah ke atas. Wujud dari penerapan tujuan tersebut antara lain dengan dilaksanakannya program Kejar Paket A dan Kejar Paket B. Dengan adanya

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h 28

program ini, diharapkan kelompok penduduk yang tidak masuk dalam usia sekolah dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah.

Latar belakang sosial ekonomi masyarakat juga berpengaruh pada keberhasilan program wajib belajar yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Selain pendidikan merupakan hal yang penting bagi seseorang dalam mencari pekerjaan, karena banyak perusahaan yang memberikan syarat tinggi untuk calon pegawai di perusahaan, pendidikan dapat menghindarkan diri dari kemiskinan. Ketika terjadi pengangguran, bekal dan ketrampilan, yang diperoleh selama pendidikan dapat membantu untuk membuka usaha sendiri untuk meningkatkan tingkat ekonomi.<sup>10</sup>

**Tabel 3**  
**Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Usia di Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2018**

Tahun	SD (10 tahun)		SMP (13 tahun)		SMA (16 tahun)	
	L	P	L	P	L	P
<b>2014</b>	113.20	104.76	93.66	91.62	56.27	54.27
<b>2015</b>	113.85	108.57	96.99	96.50	62.92	64.68
<b>2016</b>	118.01	110.81	97.74	112.68	70.12	81.07
<b>2017</b>	113.37	109.92	101.67	108.96	66.41	87.63
<b>2018</b>	107.68	120.56	94.86	88.24	59.55	100.38

**L : Laki-laki**

**P: Perempuan**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019

Jika dilihat dari jenis kelamin, angka partisipasi kasar sekolah dasar laki – laki pada tahun 2014 adalah sebesar 113,20 persen, sedangkan angka

<sup>9</sup> Bahrun, Yusuf, M., dan Amsal, A., *Identifikasi Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Miskin dalam Rangka Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar*. Laporan Penelitian, FKIP Universitas Syah Kuala, 2013, h. 56

<sup>10</sup> Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*. (Jakarta : Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007), h. 24



partisipasi kasar sekolah dasar perempuan adalah sebesar 104,76 persen. Pada tahun 2015, angka partisipasi kasar sekolah dasar laki – laki adalah sebesar 113,85 persen, sedangkan angka partisipasi kasar sekolah dasar perempuan adalah sebesar 108,57. Selanjutnya pada tahun 2016 angka partisipasi kasar sekolah dasar laki – laki adalah sebesar 118,01 persen. Dan angka partisipasi kasar perempuan adalah sebesar 110,81 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017 angka partisipasi kasar sekolah dasar laki- laki 113.37 dan angka partisipasi kasar perempuan 109.92 persen. Sedangkan, pada tahun 2018 angka partisipasi kasar sekolah dasar laki – laki sebesar 107.68 persen. Dan angka partisipasi kasar sekolah dasar perempuan adalah 120.56 persen.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pada tahun 2014 sampai 2018 angka partisipasi kasar sekolah dasar perempuan dan laki-laki cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan bila dibandingkan menurut jenis kelamin, APK sekolah dasar perempuan relatif lebih rendah daripada APK sekolah dasar laki-laki. APK sekolah dasar yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung usia sekolah lebih dari target yang seharusnya.

Ukuran yang penting dalam analisis ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran di definisikan sebagai penduduk usia

kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Namun demikian mulai tahun 2001, konsep tersebut sedikit dilonggarkan sesuai dengan rekomendasi ILO. Seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena alasan ekonomis (merasa tidak akan memperoleh pekerjaan atau sedang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai) dikategorikan sebagai pengangguran. Masalah pengangguran timbul akibat dari pasar kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Pengangguran yang dilihat dari isi masalah pasar kerja terjadi karena adanya perbedaan permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam pasar kerja baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Pengangguran juga berhubungan dengan penghasilan dan harga diri karena seseorang yang belum mendapatkan pekerjaan (dan sedang mencari pekerjaan) akan menjadi beban keluarganya sehingga harga dirinya dianggap lebih rendah dibanding yang sudah bekerja. Selanjutnya pengangguran dilihat pada sisi sebagai masalah kesempatan kerja terjadi jika lapangan pekerjaan yang tersedia (lowongan pekerjaan yang ada) hanya mampu menampung sebagian angkatan kerja sebagai akibat kurangnya kualitas atau tidak dipenuhinya persyaratan kerja oleh pencari kerja.<sup>11</sup>

Salah satu tantangan besar pemerintah dewasa ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha yang layak bagi angkatan kerja yang cenderung meningkat seiring dengan perubahan struktur umur penduduk dari waktu ke waktu. Untuk itu indikator tingkat pengangguran ini menjadi sangat penting apalagi sejak krisis moneter tahun 1997. Angka pengangguran di

---

<sup>11</sup>Yarlina Yacoub, *Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, vol 8, nomor 3, 3 Oktober 2012. H.177

Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dan belum dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pengangguran memberikan dampak yang negatif bagi pembangunan karena tingkat pengangguran yang tinggi akan mendorong banyak muncul masalah sosial dan masalah kemiskinan hingga kriminalitas.

Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling terkait, yang pada akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Masalah ini juga tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin, yang berdampak pada lemahnya etos kerja, rendahnya daya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup, kebiasaan-kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka, apabila keadaan ini berkelanjutan, maka akan melahirkan budaya kemiskinan yang sulit untuk diberantas.

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Al-Qur'an tentang kondisi kemiskinan, dimana ada orang yang memberikan rezeki lapang dan ada pula yang dalam kondisi sempit (miskin). Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Israa' Ayat 30.

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٠

Artinya : *Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.*<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan* (Jawa Barat : Diponegoro, 2014), h.

Ayat diatas menjelaskan bahwa hal itu sebagai pemberitahuan bahwa Dia adalah sang pemberi rizki, pengambil rizki, penyalur rizki, serta pengendali segala urusan makhluk-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, dan akan menjadikan miskin siapa saja yang di kehendaki-Nya. Karena yang demikian itu terdapat hikmah. oleh karena itu, Dia maha melihat siapa orang yang berhak memperoleh kekayaan dan siapa juga orang-orang yang layak hidup miskin.<sup>13</sup>

Dibawah ini disajikan data jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung menurut kota/kabupaten pada tahun 2013 – 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Miskin (dalam satuan ribuan jiwa)**  
**Menurut Kabupaten / Kota, Tahun 2014-2018**

No	Kabupaten/Kota/ Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab. Lampung Barat	60,8	60,3	42,2	44,9	43,5
2	Kab. Tanggamus	85,6	85,0	81,6	81,3	80,3
3	Kab. Lampung Selatan	163,0	161,8	157,7	158,4	156,2
4	Kab. Lampung Timur	172,2	170,7	170,1	172,6	173,2
5	Kab. Lampung Tengah	162,8	161,6	164,4	165,7	166,3
6	Kab. Lampung Utara	142,0	140,7	140,	139,5	139,7
7	Kab. Way Kanan	65,2	64,5	63,1,4	63,6	63,4
8	Kab. Tulang Bawang	33,7	36,8	44,2	44,3	44,7
9	Kab. Pesawaran	74,6 rb	74,0 rb	75,4 rb	74,5	74,2 rb
10	Kab. Pringsewu	37,3	37,8	45,6	45,7	45,5
11	Kab. Mesuji	11,2	12,8	16,0	15,7	15,5
12	Kab. Tulangbawang	16,4	18,7	21,8	22,4	23,2

<sup>13</sup>Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta 1999. h 906

	Barat					
13	Kab. Pesisir Barat			24,0	24,2	24,7
14	Kota Bandar Lampung	102,7	102,3	100,8	100,5	100,6
15	Kota Metro	17,1	16,9	16,2	16,3	16,5
	<b>LAMPUNG</b>	<b>1.144,8</b>	<b>1.143,9</b>	<b>1.163,5</b>	<b>1.169,6</b>	<b>1.167,5</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019.*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tertinggi adalah Kabupaten Lampung Timur sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Metro. Jika dilihat secara umum jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung dari tahun 2014 – 2018 mengalami dinamika yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung sebesar 1.144.800 juta jiwa kemudian turun menjadi 1.143.900 di tahun 2015, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung naik menjadi 1.163.500 juta jiwa, tahun 2017 naik lagi menjadi 1.169.600 kemudian jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung turun menjadi 1.167.500 ditahun 2018. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap tingkat pendidikan di Provinsi Lampung pada tahun periode 2014 – 2018.

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, terdapat pengaruh tingkat pendidikan yang rendah dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung dari perspektif Ekonomi Islam. Maka penelitian ini memfokuskan pengaruh tingkat pendidikan yang rendah dan upah minimum terhadap kemiskinan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti ini akan fokus pada pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan dilihat dari lapangan pekerjaan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan kebijakan pemerintah.
2. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Lampung yang masuk dalam keluarga miskin menurut versi Badan Pusat Statistik.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pembahasan penelitian yang menjadi pokok bahasan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung secara simultan?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang kemiskinan di Provinsi Lampung?

#### **F. Tujuan Dan Manfaat**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan secara parsial.
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan secara simultan.

- c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap kemiskinan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. Pengambilan kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi kemiskinan.

- b. Masyarakat umum

Sebagai bahan informasi bahwa penetapan garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan model pengukuran kemiskinan.

- c. Ilmu pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pendidikan**

##### **1. Pengertian Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan sehingga disadari pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu.<sup>14</sup> Pengertian pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan.

Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Disamping itu pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan batin cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan disetiap negara menurut Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

---

<sup>14</sup>Veithzal Rivai, Sylviana Murni, *Education Manajemen: Analisis dan Praktik*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm. 1

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya.<sup>15</sup>

Dalam konteks pendidikan di Indonesia salah seorang yang telah memberi kontribusi dalam pengembangan teori dan praktek pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Pemikiran dan karyanya telah memberi pijakan penting dalam diskursus pendidikan nasional pada masa pergerakan dan awal kemerdekaan. Gagasannya tentang pendidikan yang terangkum dalam semboyan: *Ing Ngarso Sung Tulodo* (pendidik berada didepan memberi teladan); *In madiyo mangunkarso* (pendidik berada ditengan dan terus menerus memprakasai atau memotivasi); dan *Tut Wuri Handayani* (pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju) telah menjadi ungkapan yang sangat populer hingga saat ini. Komitmen dan dedikasinya untuk mengembangkan jatidiri kultural anak bangsa melalui pendidikan untuk mewujudkan negara yang merdeka tidak dapat di nafikan.<sup>16</sup>

Pendidikan sangat penting bagi setiap individu, pendidikan secara singkat di definisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Pendidikan adalah suatu proses secara sistematis untuk mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Pendidikan memiliki orientasi saat ini dan

---

<sup>15</sup>Yuli Sectio Rini, *Pendidikan Hakekat Tujuan Dan Proses*, Jurnal Pendidikan Seni Tari, Hlm 76

<sup>16</sup>Al Musanna, *Indigenisasi Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol 2 No 1 Juni 2017, Hlm. 118

membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Lemahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.<sup>17</sup>

Pendidikan berperan penting dalam kesejahteraan seorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan informasi, memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktifitas, dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen atau warganegara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan adalah mempunyai korelasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang. Pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya,. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.

## **2. Manfaat Pendidikan**

Pembahasan tentang manfaat pendidikan harus diawali dengan dua pengamatan dasar. Pertama bahwa orang – orang dengan pendidikan yang

---

<sup>17</sup> Licolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Universitas Gajah mada, 2015), hlm. 300

lebih tinggi berbeda dengan orang yang kurang berpendidikan. Pengamatan kedua adalah perubahan individu setelah mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap karakteristik tersebut harus dapat dipahami agar mereka dapat mencapai manfaat dalam pendidikan. Sebagai tambahan pengaruh orang lain dalam masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung (keluarga, teman-teman dan guru). Manfaat yang akan diperoleh mudah sekali untuk dijelaskan, tiap individu yang belajar membaca di sekolah, akan lebih baik dari mereka yang tidak dapat membaca.<sup>18</sup>

Dalam ekonomi hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonom membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah sesuatu yang dapat mengembangkan orang lain selain pendidikan. Masyarakat lebih baik karena pendidikan mereka. Fungsi memahami pendidikan, penting sekali mengetahui apa manfaat yang meluas dari pendidikan agar dalam mengalokasikan sumber tidak hanya antara berbagai macam dan tingkat sekolah, tetapi juga antara pendidikan dan juga program sosial. Manfaat pendidikan juga harus dihargai untuk memutuskan bagaimana membiayai pendidikan pada tingkat yang berbeda, secara mendasar pengetahuan diperlukan sebagai manfaat pendidikan sehingga proses pendidikan dapat dievaluasi melalui analisis harga manfaat yang berhubungan dengan alokasi dana dan dalam penempatan

---

<sup>18</sup>Veithzal Rival Zainal, Haryadi Kamal, dan Natsir Muhammad, *The Economics Of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta, 2014, hlm 41

manajemen. Bagi sebagian orang, pendidikan merupakan hal yang paling utama yang harus mereka lalui, bahkan semenjak seseorang berusia enam tahun atau kurang, mereka sudah mulai memasuki dunia pendidikan formal. Berapa lama pendidikan resmi yang harus kita jalani, ini tergantung dari kemampuan seseorang menjalaninya, ada yang sampai berumur dua puluh sampai tiga puluh bahkan lebih, kesempatan dan keinginan seseorang sangat berperan dalam hal ini.<sup>19</sup>

### **3. Tujuan Pendidikan**

Tujuan pendidikan sangat beragam, tergantung dari pribadi masing-masing, ada yang bertujuan hanya sebagai syarat sebagai bagian dari keluarga besar berpendidikan tinggi. Untuk hal itu, ada tiga kategori tujuan dari pendidikan, yaitu tujuan pendidikan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan (bahkan dunia). Pendidikan bermanfaat untuk mengarahkan manusia ke cita-citanya dimasa depan. Pendidikan juga bermanfaat untuk mendidik manusia menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia.

#### **a Tujuan pendidikan untuk pribadi**

Saat ini, bagi seseorang pribadi yang ingin memasuki dunia pekerjaan, mereka diharuskan memiliki “nilai minimal” dari pendidikannya, sampai sejauh mana seseorang itu menjalani pendidikan SD, SMP, SMA atau melanjutkan ke universitas terkenal. Tujuan pendidikan bagi setiap orang sudah mulai terlihat, pendidikan

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 260

adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk memasuki sebuah perusahaan yang mereka dambakan.

Bagi seorang muslim, pendidikan atau menuntut ilmu itu wajib dan tidak terbatas oleh waktu dan lokasi. Tujuannya adalah menjalani kewajiban, menambah nilai, dan menyalurkan hasrat mencari ilmu sebagai seorang pribadi yang berpikiran ingin maju dan sukses.<sup>20</sup>

b Tujuan pendidikan untuk keluarga

Tujuan pendidikan bagi sebuah keluarga juga menyangkut derajat dari keluarga sendiri, jika sebuah keluarga memiliki ayah dan ibu yang hanya lulusan SD, maka jika anaknya bisa sampai memiliki gelar sarjana akan memberikan nilai dan derajat sebuah keluarga itu sendiri. Seseorang yang memiliki pendidikan cukup dapat menjamin keluarganya dalam hal ekonomi, ini karena orang yang bermodal cukup untuk memasuki perusahaan yang mewajibkan para pekerja berpendidikan tinggi, sekarang perusahaan-perusahaan mewajibkan akan hal ini walau tidak semuanya bermodalkan gelar atau pendidikan tinggi.<sup>21</sup>

c Tujuan pendidikan untuk negara

Setelah kepentingan pribadi dan keluarga, tujuan dan keutamaan pendidikan juga tidak lepas dengan Negara, bahkan keberhasilan sebuah Negara bisa dilihat dari sejauh mana warganya menjalani pendidikan. Negara maju selalu memiliki warga yang cerdas dan

---

<sup>20</sup> Veithzal Rivai Zainal, Haryadi Kamal, dan Natsir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 197

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 180

berpendidikan tinggi. Pendidikan yang tinggi juga membuat seseorang bisa meraih prestasi yang bagus untuk kebanggaan Negara, mereka juga bisa membuat sebuah Negara terlihat hebat karena dari karyanya.

Ki Hadjar memaknai pendidikan sebagai proses pemberian tuntunan untuk menumbuh kembangkan potensi anak. Dalam istilah tuntunan tergambar bahwa tujuan pendidikan mengarah pada pendampingan anak dalam proses penyempurnaan ketertiban tingkah lakunya. Dalam artikel berjudul “Sifat dan Maksud Pendidikan” yang dipublikasikan pada tahun 1942, beliau mengemukakan bahwa tujuan pendidikan ialah kesempurnaan hidup manusia sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang diperoleh dari kodrat alam. Rumusan tujuan pendidikan Ki Hadjar diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sejalan dengan tujuan pendidikan tersebut, Ki Hadjar menegaskan pendidikan mengemban misi agung dalam pengembangan budi pekerti peserta didik. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti mempunyai kemampuan untuk senantiasa mempertimbangkan, merasakan, dan menggunakan ukuran dalam bertindak. Budi pekerti yang dimiliki seseorang dapat memandunya



mengambil keputusan atau menentukan secara mandiri tindakan yang dipilihnya secara bijaksana. Konsep pendidikan yang diarahkan pada pengembangan kompetensi peserta didik dengan memaksimalkan potensi alami peserta didik dengan mengoptimalkan daya-daya yang berada di sekelilingnya merupakan pandangan yang semakin mendapat tempat dalam diskursus pendidikan kontemporer.<sup>22</sup>

Pendidikan tidak semestinya dibatasi pada pengembangan dimensi akademik atau lebih sempit lagi pada dimensi pengetahuan (kognitif) semata. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>23</sup>

Pendidikan dasar merupakan bagian dari *public good* dan kemajuan suatu bangsa tidak lagi bertumpu pada kekayaan alam dan kecanggihan teknologi saja melainkan pada keunggulan sumber daya manusia yaitu, tenaga terdidik, berintegrasi tinggi dan mempunyai kapabilitas yang luas sehingga mampu menghadapi tantangan-tantangan zaman yang semakin maju disertai dengan perkembangan

---

<sup>22</sup> Al Musana, *Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksisi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017, Hlm. 122

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 122.

teknologi yang sangat canggih. Sebanyak apapun sumber daya alam dan sehebat apapun teknologi disuatu Negara atau bangsa jika tidak diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia nya, maka lambat laun negara akan mengalami kemiskinan. Sebagaimana bahwa pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan bermartabat. Pendidikan memainkan peran kunci dalam mementuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

#### 4. Tujuan Pendidikan Dalam Islam

Islam sangat memperhatikan anak dengan dengan memberikan kepadanya pendidikan yang Islami, agar seseorang anak mendapat petunjuk yang jelas dalam perjalanannya menuju kehidupan yang mulia. Tujuan pendidikan dalam Islam:<sup>24</sup>

- a. Mengikuti akidah tauhid. Yaitu tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk mengembangkan potensi ketuhanan peserta didik yang dibawa sejak lahir (QS, Al- a'raf; [7]: (172),

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ .

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian

---

<sup>24</sup> Fuhaim Musthafa, *Kurikulum Anak Muslim, terjemah Wafi Marzuki Ammar*, Pustaka Elba, Surabaya, 2009, hlm. 31

terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Dan Allah satu-satunya tempat untuk memohon dan meminta pertolongan (QS, Al- ikhlas; [112]: (1-2)),

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

Artinya: "Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu."

Ketaatan dan ketundukan kepada tuhan yang satu itu senantiasa membimbing fitrah ketuhanan peserta didik dan pada akhirnya pendidikan menempatkan peserta didik untuk memperoleh derajat yang taqwa (QS, Al- nisa; [4]: 131)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۚ

Artinya: "Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. tetapi jika kamu kafir Maka (ketahuilah), Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji"

- b. Memberikan perhatian penuh terhadap nilai-nilai Islam, serta menumbuhkan anak dalam perilaku dan akhlak mulia. Melalui

pengenalannya terhadap rukun iman dan rukun Islam, serta saat dia mempelajari Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi.

- c. Mewujudkan keseimbangan antara materi dan rohani, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
- d. Mengadakan dialog dengan akal dan hati demi mewujudkan kebahagiaan manusia muslim.
- e. Mendidik manusia muslim agar memiliki sifat amanah dan tanggung jawab pada setiap perbuatan dan perkataan.
- f. Mengembangkan kepandaian berfikir secara rasional dan ilmiah pada seorang muslim.

## **5. Pendidikan dan pasar kerja**

Beberapa tujuan pendidikan memiliki perbedaan konsentrasi yang dititik beratkan dari waktu ke waktu. Pendidikan dijadikan tolak ukur perkembangan atau kemajuan ekonomi suatu negara. Hal inilah yang sering menjadi perdebatan dalam program pengurangan pengangguran di usia muda pada negara-negara maju. Hubungan antara ketenagakerjaan dan pendidikan sangat kompleks sehingga tidak bisa melihat dari satu sisi masalah saja. Karakter individu, karakter pekerjaan, secara bidang pendidikan yang terjadi pada seseorang sangat berpengaruh pada status sosialnya.<sup>25</sup>

Pendidikan, penghasilan, status ekonomi sosial dan jabatan memiliki hubungan positif. Beberapa pakar ekonomi sosial telah mengadakan

---

<sup>25</sup> Fuhaim Musthafa, hlm. 300

penelitian bahwa peningkatan kesejahteraan hidup baik status sosial, ekonomi, maupun pekerjaan, dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pendidikan. Tentang minat seseorang untuk meningkatkan pendidikannya, biasanya mereka hubungkan dengan menghitung biaya pendidikan dengan *income* yang akan mereka dapatkan dimasa depan. Profil penghasilan menurut usia menunjukkan semua tingkatan pendidikan, kenaikan penghasilan menjadi persyaratan utama bagi tenaga kerja. Untuk negara-negara berkembang, perubahan penghasilan lebih ditekankan pada karyawan senior dimana pengalaman dan loyalitasnya sudah teruji.<sup>26</sup>

Tingkat penghasilan dan keuntungan atas investasi bidang pendidikan diperhitungkan, walau masih banyak negara-negara maju yang tidak mempertimbangkan kenaikan upah berdasarkan kompetisi individu mereka lebih banyak memperhatikan para senior yang diyakini dapat bekerja secara profesional, sehingga lulusan-lulusan yang baru dari sekolah tidak mendapatkan upah yang semestinya. Dengan demikian, bahwa hubungan pendidikan dan jabatan, penghasilan dan status sosial, sangat dipengaruhi oleh tingkat pengaruh oleh tingkat pendidikan dan pembagian upah. Yaitu dengan sistem pendekatan yang bisa digunakan dalam bidang pendidikan yang dapat menambah kompetensi seseorang, seperti kemampuan matematika, membaca, dan keterampilan peningkatan produktivitas. Dalam pendekatan ini, banyak diterapkan disekolah, sehingga setiap lulusan sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan

---

<sup>26</sup>Fuham Musthafa, hlm 302.

kebutuhan perusahaan. Sekolah memiliki peluang untuk mengubah wawasan dan pengetahuan seseorang, melalui tingkat pendidikan maka terdapat kemajuan pada produktivitas karyawan, sehingga akan berdampak pada *income* mereka.<sup>27</sup>

Kemampuan seseorang dalam bekerja lebih tinggi, nilai manusia lebih luas dari sekedar bekerja. Sehingga untuk pekerja lebih meningkatkan makna dirinya jika dapat menciptakan pekerjaan. Tenaga kerja yang tidak terserap dalam lingkup dunia kerja dan industri, akan berdampak pada pengangguran, yang disebabkan karena penyimpangan kapitalisme, yang menciptakan kondisinya adanya pengangguran adalah para kapitalisme dan negara, yang mendukung para kapitalis dalam menentukan pilihan barang-barang yang akan mereka buat dan dalam hal teknologi yang akan mereka gunakan. Agar tidak terjadi kegagalan maka pakar ekonomi pendidikan mengembangkan analisis kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan riil (*demand*) dipasar tenaga kerja, dan prospek lulusan dari dunia pendidikan (*supply*). Pendidikan adalah salah satu investasi dalam sumber daya manusia, selain kesehatan dan migrasi. Pendidikan memberikan sumbangan secara langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional, melalui peningkatan keterampilan dan produktifitas kerja. Keterampilan praktis yang dapat terserap pasar sesuai potensi ekonomi, dan kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga interaksi dengan pengetahuan dapat

---

<sup>27</sup> Fuhaim Musthafa, hlm.301-302

berdampak pada tingkat kemandirian yang diperlukan dalam kecakapan hidup dalam bekerja.<sup>28</sup>

## 6. Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi

Ada tiga teori tentang pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut adalah : teori modal manusia, teori alokasi atau teori reproduksi strata sosial, dan teori pertumbuhan kelas.<sup>29</sup>

### a. Teori modal manusia

Teori modal manusia menjelaskan menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini telah mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan dari pasca perang dunia kedua sampai tahun 70-an. Para pelopornya antara lain adalah pemenang hadiah Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Denison dan Theodore Schultz, yang juga pemenang hadiah nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini.

Argumentasi yang disampaikan oleh pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka akan semakin

---

<sup>28</sup>Nurul Malikhah, *Pragmatisasi Pendidikan Dalam Dunia Kerja*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, Nomor 1, April 2014, Hlm. I65

<sup>29</sup> Nugraha SBM, *Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Undip, Media Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 29 No. 2 Juli 2014, Hlm. 196-197



tinggi produktivitas, sehingga hasilnya ekonomi nasional akan bebrtumbuh lebih tinggi.

b. Teori alokasi atau reproduksi status sosial.

Pada tahun 70-an, teori modal manusia mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Toeri ini juga menekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhankan.<sup>30</sup>

Sehingga, orang berpendidikan rendah tetap mendapat pelatihan akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggin dan formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungn dari Lester Thurow), John Meyer, dan Randall Collin.

Dalam teori alokasi ini memperlakuan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang slah satu fungsinya mengalokasikan personil secara soail menurut strata pendidikan lebih tinggi. Walaupun orang-orang yang berpendidikan tinggi memiliki proposi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, akan tetapi peningkatan proposi orang yang

---

<sup>30</sup> Nurul Malikah, *Pragmatisasi Pendidikan Dalam Dunia Kerja*, hlm 170.

berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.

c. Teori pertumbuhan kelas

Teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan pada studi-studi tentang hal-hal bersifat klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sementara pendidikan bagi rakyat kebanyakan dibuat sedemikian rupa untuk melayani kepentingan kelas dominan. Sebagai hasilnya, proses pertumbuhan kelas menghambat kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini antara lain didukung oleh Samuel Bowles dan Herbert Gintis.<sup>31</sup>

## 7. Pendidikan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pendidikan dalam islam adalah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami, dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendidikan Islam menurut Langgulung adalah pendidikan yang tercakup dalam delapan pengertian, yaitu *At-tarbiyyah Ad-Din* (pendidikan Keagamaan), *At-Ta'lim fil Islamiy* (Pengajaran Keislaman), *Ar-Tarbiyyah Al Muslimin* (pendidikan orang-orang islam), *Ar-Tarbiyyah 'inda Muslimin* (pendidikan dikalangan orang-orang islam), *Ar-Tarbiyyah fil Islami*

---

<sup>31</sup>Nugraha SBM, *Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, hlm 200.

(Pendidikan dalam Islam), *At-Tarbiyyah Al- Islamiyyah* (Pendidikan Islam).<sup>32</sup>

Para ahli pendidikan dalam istilah-istilah dari aspek perbedaan antara *Tarbiyyah* dan *Ta'lim*, atau antara pendidikan dan pengajaran. Istilah pendidikan biasanya lebih diarahkan pada pembinaan watak, moral, sikap dan kepribadian, atau lebih mengarah kepada efektif, sementara pengajaran lebih diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau menonjolkan dimensi kognitif atau psikomotor.

Pengertian pendidikan bahkan lebih diperlukan cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial, sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua rang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak, kedua pengertian ini harus bernafaskam atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Mohammad Athiyah al Abrasyi pendidikan itu ada tiga macam.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Veithzal Rivai Zainal, Haryadi Kamal, Dan Natsir Muhammad, *The Economics Of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendidikan Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta, 2014, Hlm. 41

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 42

a. Pendidikan *Kuttab*

Kuttab adalah tempat utama dalam Islam untuk mengajari anak-anak usia dini (usia 5-10 tahun) yang memfokuskan dalam pembelajaran ilmu Al-quran. Pendidikan ini adalah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak di *kuttab*. Sebagian diantara mereka hanya berpengetahuan sekedar pandai membaca, menulis dan menghafal Al-Qur'an semata.

b. Pendidikan umum

Adalah pendidikan pada umumnya, yang mengajarkan di lembaga-lembaga pendidikan dan mengelola atau melaksanakan pendidikan Islam secara formal seperti madrasah-madrasah, pondok pesantren, ataupun informal seperti didalam keluarga.

c. Pendidikan khusus

Adalah pendidikan secara privat yang diberikan secara khusus kepada satu orang atau lebih dari seorang anak pembesar kerajaan (pejabat) dan lainnya.

Mengingat Allah sendiri telah menciptakan manusia dengan dua kecenderungan pokok baik dan buruk, dengan kata lain bahwa manusia pada suatu saat mampu untuk berbuat baik dan pada saat lain dapat berbuat buruk, dengan kebebasan kehendak, kebebasan memilih dan bertindak yang telah di anugerahkan tuhan kepadanya.

Maka pendidikan islam disamping memang mementingkan pendidikan intelektual dan pendidikan jasmani, dengan demikian juga

jelas mementingkan unsur-unsur pembinaan moral (akhlak) manusia, yang merupakan implikasi teoritis dan logis dari adanya tanggung jawab manusia sebagai pengembal amanah.

Oleh karena itu, maka seluruh aktifitas kependidikan dalam Islam, baik pendidikan yang dilakukan dalam keluarga, sekolah ataupun masyarakat, kesemuanya adalah diarahkan kepada tercapainya manusia yang anak atau generasi berikutnya, serta membimbing dan mengarahkan agar mereka mampu mewarisi dan mengembangkan ugas kekalifahan secara berkesinambungan. Dalam quran surat al nisa ayat: 9.<sup>34</sup>

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya Allah tidak menyukai jika seseorang meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah (bodoh dan miskin) Islam menyukai ummat yang kuat, cerdas, cukup secara materiil, sehat secara jasmani yang mental yang tangguh sehingga mereka mampu bermanfaat untuk membela agama, bangsa dan negara.

---

<sup>34</sup>Kholid Musyaddad, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Al- 'Ulum; Vol. 1, Tahun 2012, Hlm. 41-42

## B. Upah Minimum

### 1. Pengertian Upah

Pasar tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-pasar lainnya dalam perekonomian diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah.<sup>35</sup> Nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup (subsisten) bagi buruh yang bersangkutan. Upah sebesar ini disebut upah alami (*natural wage*) besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi barang dan jasa.<sup>36</sup>

Tingkat upah dalam bentuk sejumlah uang dalam kenyataannya tidak pernah fleksibel dan cenderung terus menurun turun karena lebih sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. Kemerosotan ekonomi selama dekade 1980-an yang melanda negara-negara Afrika-Amerika Latin mengakibatkan merosotnya upah dan gaji riil disegunap instansi

---

<sup>35</sup> Mankiw, N Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 2003. Hlm 4.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 11

pemerintah, namun ternyata masih banyak calon pekerja yang memburu posisi kerja disektor formal meskipun mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak memadai untuk membiayain kehidupan mereka sehari-hari. Tingkat pengangguran (terutama pengangguran terselubung) sangat parah dan semakin buruk.<sup>37</sup>

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah adalah pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalkan seperti pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap.<sup>38</sup>

Pengertian Upah Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No 13

Tahun 2000, Bab 1, Pasal 1, Ayat 30:

*“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan*

---

<sup>37</sup> Todaro, P. Michael, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta Penerbit Erlangga, 2000, Hlm. 327

<sup>38</sup> Sukirno, Sadono, *Miko Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrahedi Persada, 2008, Hlm. 350-351



*menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.*

Upah berdasarkan pasal 12 peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan sebagai berikut: “upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau suatu hasil yang artinya bisa dengan menggunakan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil (bagi hasil). Disebutkan didalam pasal 15 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 penetapan upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disepakati”.<sup>39</sup>

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi, upah yang diberikan tergantung pada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
2. Peraturan Undang-Undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja.
3. Produktivitas marginal tenaga kerja.
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 350

produksi, sehubungan dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:

1. Upah nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.
2. Upah riil adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.<sup>40</sup>

Didalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan kepada tenaga kerja oleh pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pegawai tetap dan pembayaran atas pekerja kasar yang tidak tetap. Sehingga didalam teori ekonomi kedua jenis pendapatan pekerja tersebut disamakan dengan nama upah.<sup>41</sup>

Pengertian upah menurut Sadono Sukirno adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar. Sedangkan dalam teori ekonomi upah diuraikan sebagai pembayaran atas jasa – jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.351

<sup>41</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga*, ( Jakarta: Rajawali Pers,2006), Hlm. 351.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 355.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.<sup>43</sup> Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.<sup>44</sup>

Dari beberapa definisi tentang upah diatas maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

## **2. Teori – teori Upah**

Berikut ini adalah teori – teori mengenai upah yaitu :

### **a. Teori upah hukum alam**

Adalah upah yang ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga pekerja yang telah dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan itu, agar dapat terus digunakan dalam proses produksi.

Maksud dari teori ini adalah besaran upah yang dikeluarkan oleh perusahaan harus mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>43</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, Hlm. 90

<sup>44</sup> Malayu, SP, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 2014, Hlm. 133

untuk para bekerja mampu bertahan hidup serta mencukupi kebutuhan keluarganya.

b. Teori upah hukum besi

Teori ini dipakai oleh para ahli ekonomi liberal untuk memperdaya kaum pekerja sehingga upah pekerja tersebut terlalu mencekam. Keadaan ini mengekang kebutuhan hidup para buruh, sedangkan kebutuhan pengusaha yang mempekerjakan sangat berlebihan.

Teori ini sangat merugikan karyawan, karena gaji yang dibayarkan terlalu kecil sehingga kebutuhan mendasar para karyawan sering kali tidak terpenuhi dan disisi lain keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan hanya dinikmati oleh para petinggi perusahaan, pemilik, dan pemegang saham.

c. Teori persediaan upah

Menurut Stuwart Mill senior bahwa dalam suatu masyarakat untuk pembayaran upah sudah tersedia suatu jumlah tertentu.

Teori ini menerangkan bahwa untuk besaran pembayaran upah sudah memiliki aturan tersendiri dalam hal ini peraturan tersebut ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk upah minimum kabupaten dan upah minimum regional.

d. Teori upah etika

Teori ini sangat memperhatikan nasib pekerja, menghendaki supaya perihal upah juga ditinjau dari sudut etika, yaitu bahwa upah harus menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.<sup>45</sup>

Teori ini dinilai paling memihak kedua belah pihak yaitu perusahaan dan nasib pekerja. Perusahaan memberikan upah atau gaji dengan melakukan beberapa pertimbangan termasuk untuk membantu mensejahterakan keluarga para pekerja agar mampu menjalani kehidupan dengan layak tanpa kekurangan dari segi finansial.

### **3. Upah Minimum Terhadap Standar Layak Hidup**

Kebijakan upah di Indonesia menunjuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja menetapkan bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (SHL). Pasal 1 ayat 1 dari peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, mendefinisikan upah sebagai “*upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan hidup*”. Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara

---

<sup>45</sup>Zulkarnain Ibrahim. *Jurnal Hukum Pengupahan yang Berkeadilan dan Substansif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)*, Universitas Sriwijaya: 2017 hlm 296.

pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektoral maupun subsektoral.

Peraturan menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum sektoral pada tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral ditingkat kabupaten atau kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten atau kota tersebut.

Melalui suatu kebijakan pengupahan, pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup. Upah minimum yang ditetapkan pada masa lalu didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum, dan selanjutnya didasarkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kebutuhan Hidup Minimum ini adalah 20 persen lebih tinggi dalam hitungan rupiah jika dibandingkan dengan Kebutuhan Fisik Minimum. Peraturan perundangan terbaru, UU No. 12/2003, menyatakan bahwa upah minimum harus diteruskan pada Kebutuhan Hidup Layak, akan tetapi perundangan ini belum sepenuhnya diterapkan, sehingga penetapan upah minimum tetap didasarkan pada kebutuhan hidup minimum. Pada masa sekarang, kelayakan suatu standar upah minimum didasarkan pada pekerja sesuai dengan kriteria di bawah ini:

1. Kebutuhan hidup minimum.
2. Indeks harga konsumen.

3. Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya dan kelangsungannya.
4. Standar upah minimum di daerah sekitar.
5. Kondisi pasar kerja.
6. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.<sup>46</sup>

#### 4. Penggolongan upah

Gaji umumnya dianggap lebih tinggi dari pada pembayaran kepada pekerja upahan, walaupun pada kenyataannya sering tidak demikian. Sedangkan upah dalam teori ekonomi konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.<sup>47</sup> Dengan demikian yang membedakan upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya.

Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu.

##### a. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan.

---

<sup>46</sup>Rini Sulistiawati, "Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Indonesia", Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, Hlm. 201

<sup>47</sup>F Winarni Dan G Sugiyarso, *Administrasi Gaji Dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006) Cet. Ke-1, Hlm. 25

Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.

b. Upah sistem hasil (*output*)

Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti terpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayarkan selalu berdasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan kepada lamanya waktu mengerjakan.

c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti lama mengerjakan serta banyaknya alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.<sup>48</sup>

## 5. Jenis- jenis upah

Jenis-jenis upah menurut Zaeni Asyhadie yaitu: <sup>49</sup>

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya seauai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah Nyata (*riil wages*)

---

<sup>48</sup>Rivai Veithzhal, *Education Manajemen: Analisis dan Praktik*, hlm. 69

<sup>49</sup>Ibid, hlm. 70



Upah riil adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

c. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, auransi, rekreasi, dan lain-lain.

d. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota), dan setiap tahun berubah. Adapun tujuan ditetapkannya upah minimum yaitu.<sup>50</sup>

- 1) Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja.

---

<sup>50</sup>Zaeni syhadie, op. Cit. Hlm. 71

- 2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan.
- 3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenagaan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- 5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

e. Upah yang wajar

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>51</sup>

- 1) Kondisi perekonomian negara.
- 2) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada.
- 3) Peraturan perpajakan.
- 4) Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri.
- 5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.
- 6)

---

<sup>51</sup>Zaelani asyhadie, op. Cit. Hlm. 72

## 6. Upah Minimum Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Upah dalam islam sering disebut *jaza'* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman allah diantaranya surah An-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kata “*walanajziyannahum*” pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik didunia (materi) maupun akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal sholeh dengan imbalan didunia dan di akhirat<sup>52</sup>. Sedangkan dalam kata “*amal sholeh*” mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi keluarga kelompok dan manusia secara keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal Al-Qur’an dan hadits. Oleh karena itu dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik diperusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai

---

<sup>52</sup>Kholid Musyaddad, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. hlm. 28.

amal sholeh sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan *syara'*.

Islam menegaskan bahwa tidak boleh dan deskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan *ikhtiyar* yang dilakukan secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*). Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara dua belah pihak akan menimbulkan kompensasi. Pada terminologi fiqih muamalah transaksi antara barang dengan uang disebut *saman* (harga atau *price*). Sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah atau *wage*). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik dengan uang.<sup>53</sup>

Sementara menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat dipasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian upah dalam perspektif islam adalah imbalan (*compensation*) yang diterima pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah

---

<sup>53</sup>Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, hlm. 224.

dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi *diniawi* (materi atau kebendaan) dan *ukrawi*.<sup>54</sup>

Syariat islam memandang upah sebagai hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi pengusaha. Pada pasar persaingan sempurna tingkat upah yang berkeadilan terjadi pada tingkat *market wage*, dan untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar. Namun islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai moral atau kemanusiaan mengharuskan adanya pertimbangan meliputi nilai kerjasama, tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.<sup>55</sup>

Sistem upah islam menghendaki agar pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak memperbolehkan berlaku sewenang-wenang menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Oleh karena itu upah yang diberikan adalah upah adil dan layak, upah yang berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik), juga pekerja harus berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dan memperoleh fasilitas

---

<sup>54</sup> Al Musana, *Indigiensi Pendidikan*, hlm. 123.

<sup>55</sup> Bahrin, *Identifikasi Fakttor Penentu Tingkat Partisipasi Pendidikan Pada Masyarakat Miskin*. Hlm. 66.

medis bagi keluarganya. Dengan demikian upah yang diberikan kepada pekerja harus berada diantara tingkat upah minimu dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontrobusi yang telah diberikan oleh para pekerja.<sup>56</sup>

## C. Kemiskinan

### 1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata – rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendaptan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi stndar hidup rata – rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.<sup>57</sup>

Berdasarkan Undang – Undang No. 24 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak - hak dasarnya untuk mempertahankan dalam mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman daru

---

<sup>56</sup> Armansyah waliam, upah berkeadilan ditinjau dari perspektif islam, jurnal bisnis dan manajemen islam, vol. 5, no 2, desember 2017. Hlm, 284

<sup>57</sup>Elly M Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 788

perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya.<sup>58</sup>

Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran – ukuran baku. Menurut pengertian ini kemiskinan sekelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk layak.<sup>59</sup>

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan, atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini dari komposisi pangan bernilai gizi yang cukup sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan

---

<sup>58</sup> Abdul Rahman, “Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa”, *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Vol IV No. 2 (Agustus, 2004), hlm. 147

<sup>59</sup> Cica Sartika, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan”, *Jurnal Dan Makalah*, Vol 1 No. 1 (April 2016), hlm. 23

iklim, dan lingkungan yang dialaminya serta sandang, papan, dan teruma pangan.

Dimensi kemiskinan meliputi beberapa aspek penting yaitu pertama, aspek Politik, yaitu tidak memiliki akses keproses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Kedua aspek Sosial yaitu tersingkir dari instusi utama masyarakat yang ada. Ketiga aspek Ekonomi yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan dan keempat adalah aspek Budaya atau nilai yang terperangkap kedalam budaya rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.<sup>60</sup>

Menurut supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta, kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manuia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Licolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Universitas Gajah mada, 2015), hlm. 300

<sup>61</sup>Yulianto Kadji, *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG, Hlm. 4



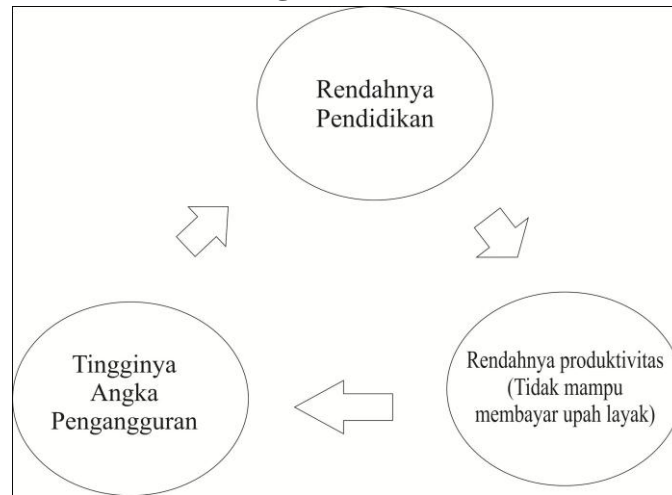
Menurut Mudrajat Kuncoro (1997) penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse (1953) yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya tingkat pendidikan; (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh ketidakmampuan membayar upah yang layak). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya.<sup>62</sup>

Secara singkat teori lingkaran kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>62</sup>Prima Sukmagara *Loc Cit.*

**Gambar 1**  
**Teori Lingkaran Kemiskinan**



Berdasarkan gambar diatas, maksudnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang digambarkan dengan rendahnya tingkat pendidikan maka akan menurunkan tingkat produktivitas kerja, rendahnya tingkat produktivitas kerja mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan hasil yang maksimal sehingga tidak bisa memberikan upah yang layak kepada pegawai atau rendahnya tingkat produktivitas kerja mengakibatkan penghasilan yang diperoleh rendah, pengangguran semakin meningkat dan begitu seterusnya hingga lingkaran kemiskinan ini harus ada yang memutus.

## 2. Teori – teori Kemiskinan

Adapun teori – teori kemiskinan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

### a. Teori Paradigma Neo-Liberal

Teori pada paradigma ini menungkapkan bahwa individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan.

Pendekatan ini memposisikan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu pendekatan ini menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Kekuatan pasar menjadi kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal tersebut karena kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapus kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakkan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar-dasar teori ini.

Kelemahan dari teori paradigma neo-liberal ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan. Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, akar permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan tidak dapat ditemukan.

b. Teori Paradigma Demokrasi Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan melihat sebagai permasalahan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Tertutupnya akses bagi kelompok tertentu menjadi

penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan demokrasi sosial ini mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapus, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif.

Peran negara dalam sistem ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan harus ditangani secara institusional (melembaga) seperti melalui program jaminan sosial.

Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi kepada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan adalah bergantung pada kapabilitas kelompok miskin.

c. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini diprakarsai oleh Nurkse, yaitu teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yaitu teori yang menyatakan bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan yang diterima menyebabkan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

### 3. Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.<sup>63</sup>

#### a. Kemiskinan absolute

Pada dasarnya konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya dibatasi pada kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>64</sup>

Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolute, dengan mengacu pada definisi kemiskinan. Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang mengalami pendapatan perkapita yang tidak mencukupi untuk

---

<sup>63</sup> Elly M Setiadi, Usman Kolip, *Op. Cit.* Hlm 79.

<sup>64</sup> Elly M Setiadi, Usman Kolip, *Op. Cit.* Hlm. 80

mengonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20kg beras perkapita perbulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian)

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minum tidak selalu berarti orang tersebut miskin. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang yang ada sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep kemiskinan ini yang kemudian dikenal dengan konsep kemiskinan relatif.<sup>65</sup>

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan

---

<sup>65</sup>Elly M Setiadi, Usman Kolip. Hlm 81

seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros, atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.<sup>66</sup>

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.<sup>67</sup>

#### 4. Indikator Kemiskinan

Beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan antara lain : tingkat konsumsi beras pertahun, indeks kesejahteraan masyarakat, dan indeks kemiskinan manusia.<sup>68</sup>

a. Tingkat konsumsi beras

**Tabel 5**  
**Indikator Kemiskinan dilihat dari Konsumsi Beras Pertahun**

No	Kategori	Konsumsi Beras (Kg)	
		Perdesaan	Perkotaan
1	Melarat	180 Kg	270 Kg
2	Sangat Miskin	240 Kg	360 Kg
3	Miskin	320 Kg	480 Kg

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Secara umum penduduk pedesaan digolongkan miskin jika mengkonsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita pertahun, sedangkan,

<sup>66</sup>*Ibid.* Hlm 83

<sup>67</sup>*Ibid.* hlm. 84

<sup>68</sup>Lincoln arsyad. Hlm.95

untuk daerah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun. Patokan ini sebenarnya menggambarkan garis yang sangat miskin karena hanya didasarkan atas jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk sekedar menyambung hidup. Namun, sejak tahun 1979 sampai sekarang garis melarat dihilangkan dan kemudian ditambah dengan garis miskin, yaitu untuk daerah pedesaan setara dengan 480 kg per kapita per tahun dan untuk daerah perkotaan setara dengan 720 kg per kapita per tahun.

b. Kesejahteraan masyarakat

Indikator kesejahteraan ini dilihat dari 9 komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Namun, yang sering digunakan hanya empat komponen, yaitu kesehatan, konsumsi makanan, dan gizi, pendidikan dan perumahan. Sedangkan indikator yang lainnya sulit diukur dan sulit dibandingkan antar daerah atau antar waktu.

c. Indeks kemiskinan manusia

Indeks ini diperkenalkan oleh UNDP (*United National Development Program*) dalam salah satu laporan tahunan, *Human Development Report*. Indeks ini terlahir karena ketidakpuasan UNPD dengan indikator pendapatan per dollar per hari yang digunakan oleh bank dunia sebagai tolak ukur kemiskinan di suatu wilayah atau negara. Dengan adanya indeks ini, UNPD sengaja mengganti ukuran kemiskinan dari segi pendapatan (bank dunia) dengan ukuran dari segi pendapatan kualitas hidup manusia.



Argumen umum yang digunakan oleh UNPD adalah bahwa tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah dia tidak mampu menjangkau (atau bahkan tidak mempunyai akses) terhadap sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka sendiri adalah rendah. Jadi, bukan berapa banyak pendapatan per dollar per kapita yang mampu mereka raih tiap harinya. Ada tiga nilai pokok yang menentukan menentukan tingkat kemiskinan yaitu:

- 1) Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih baik dari 30 persen penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
- 2) Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.
- 3) Tingkat kemampuan ekonomi, diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap sarana kesehatan dan air bersih serta persentase anak-anak dibawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.

Oleh karena itu, nilai indeks kemiskinan manusia mempresentasikan proposal jumlah penduduk di suatu wilayah yang kehilangan tiga nilai pokok tersebut untuk tingkat indeks kemiskinan manusia yang rendah menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah pula begitu juga sebaliknya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Lincoln Arsyat, *Op. Cit.* Hlm. 303-306

## 5. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Dalam laporan yang dikeluarkan *word bank* (200) diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis.<sup>70</sup>

- a. kemiskinan selalu diartikan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalanya biaya pendidikan, walupun pemerintah indonesia ialah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan menengah pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (*apportunity cost*) jika anak mereka bekerja.
- b. Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan dibidang pertanian untuk daerah perdesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Pada tahun 2004 terdapat 68,7 persen dari 36,10 juta orang miskin yang tinggal di daerah perdesaan dari 60 persen diantaranya

---

<sup>70</sup> Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 1 No. 1, Januari 2008, Hlm. 5

memiliki kegiatan utama disektor pertanian. Hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh suryahadi et.al (2006), yang menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, baik diwilayah perdesaan maupun perkotaan, sektor pertanian merupakan penyebab utama kemiskinan. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sektor swktor pertanian menumbang lebih dari 50 persen terhadap total kemiskinan di Indonesia dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jas dan industri. Dengan demikian tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan siantara kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.

- c. Hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal dan lain-lainnya penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki.
- d. Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya kases terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, tranportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik.
- e. Lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan

kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar provinsi di Indonesia. Selain itu dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapaian di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar diberbagai daerah terutama di wilayah timur indonesi, hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis.

Faktor – faktor tersebut ada keterkaitan satu sama lainnya yang membentuk lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah perdesaan, karena berpendidikan rendah, maka produktivitas nya pun rendah sehingga imbalan yang akan di peroleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin juga pada generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, namun multi faktor.

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan yang lain antara lain:<sup>71</sup>

- a Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi

---

<sup>71</sup> Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 20015, Hlm. 7

pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.

- b Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitas juga rendah, upahnyapun rendah.
- c Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain seperti pendapatan.

## **6. Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Salah satu keunikan Islam adalah tidak adanya pemisahan antara aspek moral dan materi, spiritual dan fisikal dan aspek dunia dan akhirat dalam kehidupan seorang muslim, tidak seperti paham skularisme yang memisahkan antara keduanya. Begitu juga dalam mendefinisikan kemiskinan, kita harus mempertimbangkan kedua aspek secara berimbang. Dengan kata lain, yang mungkin dikategorikan “miskin secara materi” yang

biasanya diukur dengan unit moneter (uang), belum tentu tergolong dalam kategori orang-orang “miskin secara spiritual”, yaang biasanya diukur dengan kadar kedekatan kepada Allah SWT (ketaqwaan).

Secara material (ekonomi), orang-orang miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan asas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Definisi orang “miskin secara material” secara detail, dapat kita simak dari laporan *World Bank* (2000/2001) sebagai berikut:

*“Jangan tanyakan kepada saya tentang kemiskinan sebab kamu sendiri telah mewawancarai saya di depan rumah saya sendiri. Lihatlah rumah saya dan hitung berapa banyak lubang yang terdapat di atap; lihat perabotan rumah dan pakaian yang saya pakai; lihat semua dan tulis apa yang kamu lihat. Apa yang kamu dapati, itulah kemiskinan”.*

Sedang orang miskin secara spiritual adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan minimum, seperti pengetahuan agama (ukhrawi) dan umum (duniawi) yang diperlukan dalam “*berubudiya dan bertaqarrub*” kepda Allah SWT dengan mengedepankan nilai-nilai akhlaqul karimah.<sup>72</sup> Jadi, kombinasi ke dua definisi kemiskinan ini adalah definisi kemiskinan ini adalah definisi ideal kemiskinan versi Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. Al Anfaal : 28)

---

<sup>72</sup>Shabri Abd. Majid, *Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1 :43-52, Hlm. 44

Ketidakmampuan umat islam untuk mengeksplorasi SDA, sebenarnya, merupakan penyebab utama mayoritas umat islam miskin. Secara implisit ini menunjukkan bahwa kata-kata yang terkandung dalam definisi ilmu ekonomi konvensional yang menyebutkan “ketersediaan SDA terbatas untuk memenuhi keperluan manusia yang tidak terbatas” sama sekali tidak bisa diterima Islam. Tidak sedikit ayat Al-Qur’an yang menegaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan SDA (nikmat) yang melimpah ruah baik bersumber dari langit, darat, dan bahkan lautan. Allah berfirman dalam Q.S. Ibrahim: 32.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.

*Artinya: "Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai."*

Ayat ini menjelaskan bahwa: “Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat berupa sumber daya alam yang meliputi, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak untuk digunakan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan manusia guna mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga tidak ada kelangkaan atas sumber daya alam tersebut. Akan tetapi kemampuan (ilmu) manusialah yang terbatas untuk mengeksplotasi SDA alam yang menyebabkan manusia terperosok dalam kemiskinan”. Artinya islam

tidak mengenal konsep kelangkaan sumber daya alam yang ada hanyalah keterbatasan sumber daya manusia itu sendiri dalam mengeksploitasi alam.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian wongdesmiwati (2009) dalam jurnal “pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di indonesia: analisis ekonometrika”,

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dari tahun 1990 hingga tahun 2004. Hasil dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel angka harapan hidup, pengguna listrik, dan konsumsi makanan tidak signifikan berpengaruh terhadap penduduk miskin.

2. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dalam jurnal “dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin”,

Penelitian ini menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan adalah data dari 26 provinsi tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relatif kecil. Variabel inflasi dan variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan,



sedangkan variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.

3. Rasidin K. Sitepu dan Bonar Sinaga (2005), dalam jurnal dampak investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia: pendekatan model *computabel general equilibrium*”.

Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan, dan investasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Investasi kesehatan dan investasi pendidikan sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, namun investasi kesehatan memiliki presentasi yang lebih besar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menguji pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabelnya, jika penelitian terdahulu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, dampak investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini variabelnya adalah pengaruh pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan. Dan yang membedakan lainnya adalah studi kasusnya, penelitian ini terletak di Provinsi Lampung.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.<sup>73</sup>

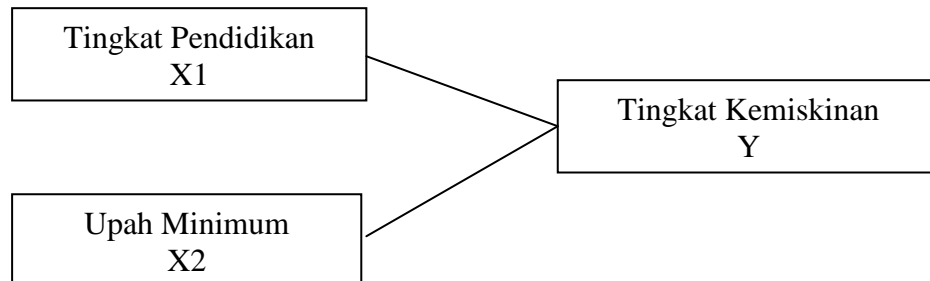
Tujuan utama penetapan upah minimum adalah meningkatkan kesejahteraan dan melindungi pekerja. Upah minimum mencerminkan pendapatan yang diterima pekerja. Adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penetapan upah minimum yang pantas dan tepat diharapkan mendorong penduduk yang berada dibawah kemiskinan mampu hidup layak sehingga tingkat kemiskinan akan turun.

Keterkaitan pendidikan dan kemiskinan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktifitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktifitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

---

<sup>73</sup> Sutisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), h. 238

**Gambar 2**  
**Kerangka Berfikir**



Sesuai diagram diatas, alur pemikiran pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel dependeng dengan variabel independen, bagaimana pengaruh variabel pendidikan terhadap tingkat kemiskinan secara individu, untuk mengetahui hubungan bagaimana pengaruh variabel upah minimum terhadap tingkat kemiskinan secara individu, kemudian untuk melihat bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan dan upah minimum secara berdampingan (secara simultan) terhadap variabel tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi Lampung.

Hubungan tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap kemiskinan memiliki hubungan yang sangat kuat dimana kualitas sumber daya manusia sebagian besar ditentukan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh orang tersebut. Maka semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka semakin besar kualitas sumber daya yang dimiliki sehingga semakin besar kemampuannya menghadapi dunia kerja dan pada akhirnya produktivitasnya meningkat, ia menjadi orang yang produktif menghasilkan banyak karya yang dihargai oleh perusahaan tempat ia bekerja dengan pemberian upah sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaan yang mampu diselesaikan yang secara otomatis pendapatan

tersebut akan menunjang pemasukan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Secara otomatis kehidupan keluarga akan menjadi terjamin dari segi finansial sehingga angka kemiskinan menjadi berkurang

## **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>74</sup>

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas maka hipotesis yang digunakan dan akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini adalah:

$H_0$ : Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

$H_1$ : Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Hipotesis pertama yang diajukan adalah “Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan” pengaruh negatif mengartikan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendidikan adalah berbanding terbalik. Sesuai dengan teori yang diajukan pada sub bab sebelumnya bahwasanya jika tingkat pendidikan mengalami kenaikan atau kemajuan dari segi kualitas dan tingkat taraf pendidikan maka jumlah kemiskinan akan semakin menurun.

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R%D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 60

$H_0$ : Upah Minimum tidak berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

$H_2$ : Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Hipotesis kedua adalah “upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan” disesuaikan dengan teori bahwasanya jika karyawan dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan hal tersebut dibuktikan dengan pemberian upah gaji yang layak maka tingkat kemiskinan pada masyarakat akan menurun karena kesejahteraan pegawai sudah cukup terpenuhi semua.

$H_0$ : Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum tidak berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

$H_3$ : Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Hipotesis ketiga adalah “tingkat pendidikan dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan” secara individu masing-masing variabel tingkat pendidikan dan upah minimum berpengaruh negatif, oleh karena itu dilihat dari pengaruh simultannya secara bersama-sama kedua variabel berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, “*Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Desa*”, *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Vol IV No. 2 Agustus, 2004.
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Adi Widodo, Waridin, Johanna Maria K, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, vol 1 nomor 1, juli 2011.
- Al Musana, *Indigenisasi Pendidikan: Rasionalitas Revitalisasi Praksisi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Al Musanna, *Indigenisasi Pendidikan*, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol 2 No 1 Juni 2017.
- Armansyah waliam, upah berkeadilan ditinjau dari perspektif islam, *jurnal bisnis dan manajemen islam*, vol. 5, no 2, desember 2017.
- Bahrin, Yusuf, M., dan Amsal, A., *Identifikasi Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Miskin dalam Rangka Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar*. Laporan Penelitian, FKIP Universitas Syah Kuala, 2013
- Cica Sartika, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*”, *Jurnal Dan Makalah*, Vol 1 No. 1 April 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan* Jawa Barat : Diponegoro, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2008.
- Elly M Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

F Winarni Dan G Sugiyarso, *Administrasi Gaji Dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Freddy Rangkuti, *Riset Pemasaran*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Fuhaim Musthafa, *Kurikulum Anak Muslim, terjemah Wafi Marzuki Ammar*, Pustaka Elba, Surabaya, 2009.

<http://lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html>. Diakses pada Hari Kamis, 17 April 2019, Jam 20:45

<http://lampungprov.go.id/page/detail/visi-misi-provinsi-lampung.html>. Diakses pada Hari Rabu, 17 April 2019, Jam 20:44.

Ikbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program INM SPSS*, SEMARANG: UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2013.

Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2015.

Jusuf Soewadi, *pengantar metodologi penelitian*, jakarta, mitra wacana media, 2012.

Kholid Musyaddad, *Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Al- 'Ulum; Vol. 1, Tahun 2012.

Licolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Universitas Gajah mada, 2015.

Maimun sholeh, *permintraan dan penawaran tenaga kerja serta upah: teori serta beberapa potretnya di indonesia*. Universitas negeri yogyakarta, jurnal ekonomi & pendidixsn , vol 4 no 1, april 2007.

Malayu, SP, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 2014.

Mankiw, N Gregory, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 2003.

Moch. Doddy Ariefianto, *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan E-Views*. Jakarta : Gramedia, 2012.

Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa Dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.

Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta 1999.

Nugraha SBM, *Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Undip, Media Ekonomi Dan Manajemen, Vol. 29 No. 2 Juli 2014.

Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjajaran, Vol. 1 No. 1, Januari 2008,

Nur Indrianto Dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis R&D*, Jakarta: BPEF, 2014.

Nurul Malikah, *Pragmatisasi Pendidikan Dalam Dunia Kerja*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, Nomor 1, April 2014.

Nurul zuriah, *metode penelitian sosial dan penelitian teori- splan*, jakarta, bumi aksara, 2007.

Rini Sulistiawati, "Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Indonesia", Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.

Shabri Abd. Majid, *Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1 :43-52.

Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*. Jakarta : Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007.

Sudjana, *Metode Statistika*, Bandung: PT Tarsito.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung. Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-15, Bandung:Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Suharsini Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.



Sukirno, Sadono, *Miko Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT Rajagrahedi Persada, 2008.

Sutisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonesia, 2005.

Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Todaro, P. Michael, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Jakarta Penerbit Erlangga, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

V. Wiratna Sujarweni, “*SPSS Untuk Penelitian*”, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta, 2015.

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Dan Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PERSS, 2015.

Veithzal Rivai Zainal, Haryadi Kamal, Dan Natsir Muhammad, *The Economics Of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional Untuk Meraih Mutu Dengan Pendidikan Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta, 2014.

Veithzal Rivai, Silviana Murni, *Education Manajemen: Analisis dan Praktik*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Viethzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Yarlina Yacoub, *Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, vol 8, nomor 3, 3 Oktober 2012.

Yuli Sectio Rini, *Pendidikan Hakekat Tujuan Dan Proses*, Jurnal Pendidikan Seni Tari,

Yulianto Kadji, *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG.

Zulkarnain Ibrahim. *Jurnal Hukum Pengupahan yang Berkeadilan dan Substansif (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)*, Universitas Sriwijaya: 2017.